

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tingkat perkembangan teknologi di dunia sudah sampai pada era industri 4.0 dimana internet membuka jendela baru bagi setiap orang di dunia, menghubungkan setiap aspek sosial dalam satu genggam tangan bahkan satu ketikan jari dengan menggabungkan pengembangan teknologi komputer dengan pengembangan teknologi internet sehingga menghasilkan *Electronic servis (e-Service)* atau layanan elektronik baik itu dalam memenuhi kebutuhan antar individu maupun kebutuhan setiap orang di suatu negara.

Dari besarnya arus digitalisasi dunia, beberapa negara di dunia pun mulai menerapkan sistem *e-government* atau pemerintahan digital, dimana instansi-instansi pemerintahan mulai memanfaatkan adanya teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang melalui adanya internet serta teknologi komputer yang digabungkan menjadi sistem pemerintahan digital berupa *website-website* instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah bahkan di tingkat desa sekalipun, sehingga memudahkan pemerintah terhubung dengan masyarakat secara cepat melalui jejaring komunikasi digital, maupun memudahkan masyarakat memperoleh informasi dari pemerintah.

Berdasarkan UUD 1945 pasal 28F, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,

menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Oleh karena itu, adanya pengembangan *e-government* merupakan tujuan demi terciptanya hubungan timbal balik yang berkesinambungan antara pemerintah dengan masyarakat.

Dalam isi Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, pasal 3 menyatakan bahwa Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa, dan pasal 4 tentang pembinaan menyatakan, sebagai berikut :

- 1) Telekomunikasi dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah.
- 2) Pembinaan telekomunikasi diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian.
- 3) Dalam penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian di bidang telekomunikasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat serta pengembangan global.

E-government di Indonesia dimulai Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan

Pendayagunaan Telematika di Indonesia, dalam upaya optimalisasi pemanfaatan Telematika untuk pemberdayaan masyarakat dengan berpedoman pada Kerangka Kebijakan Pengembangan Dan Pendayagunaan Telematika Di Indonesia, yaitu :

- (1) Telekomunikasi untuk Mempersatukan Bangsa Dan Memberdayakan Rakyat;
- (2) Telematika dalam Masyarakat dan untuk Masyarakat;
- (3) Infrastruktur dan Informasi Nasional;
- (4) Sektor Swasta dan Iklim Usaha;
- (5) Peningkatan Kapasitas dan Teknologi;
- (6) Government On-line; dan
- (7) Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI).

Dalam penerapan *e-government*, pemerintah juga mempunyai dasar hukum yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang bertujuan untuk :

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;

- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Pengembangan *e-government* di Indonesia dimuat dalam Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, pencapaian tujuan strategis *e-government* perlu dilaksanakan melalui 6 (enam) strategi yang berkaitan erat, sebagai berikut :

- a. Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas.
- b. Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik.
- c. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.
- d. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi.

- e. Mengembangkan kapasitas SDM baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom dengan meningkatkan e-literacy masyarakat.
- f. Melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan-tahapan yang realistis dan terukur.

Pemerintah daerah diuntut untuk memberikan pelayanan publik yang efektif demi terciptanya keberhasilan yang sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti, (1) ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), (2) manjur atau mujarab, (3) dapat membawa hasil; berhasil guna (tata usaha, tindakan,); mangkus, (4) mulai berlaku (tata undang-undang, peraturan).

E-government pemerintah daerah diatur pula dalam Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, bahwa setiap instansi pemerintah pusat dan daerah harus menyusun Rencana Strategi Pengembangan *E-Government* di lingkungannya masing-masing. Rencana strategis itu dengan jelas menjabarkan lingkup dan sasaran pengembangan *e-government* yang ingin dicapai; kondisi yang dimiliki pada saat ini; strategi dan tahapan pencapaian sasaran yang ditentukan; kebutuhan dan rencana pengembangan sumber daya manusia; serta rencana investasi harus diperlukan. Untuk menghindari pemborosan anggaran pemerintah, penyusunan rencana investasi harus disertai dengan analisis kelayakan investasi terhadap manfaat sosial-ekonomi yang dihasilkan.

Penyelenggaraan *e-government* pemerintah daerah Kabupaten Cirebon berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, pada pasal 7 ayat (1) untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah dan Dinas untuk menyusun Rencana Induk *e-government* yang berisi standarisasi dan perencanaan umum dalam pelaksanaan *e-government* di lingkungan Pemerintah Daerah.

Desa Kebarepan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon merupakan salah satu desa yang sudah mulai menerapkan sistem *e-government* melalui penggunaan *website* desa sebagai sarana informasi, transparansi APBDes, artikel desa serta agenda desa. Berdasarkan data statistika jumlah pengunjung *website* desa kebarepan (kebarepan.desa.cirebonkab.go.id), pengunjung setiap harinya mencapai rata-rata 142 pengunjung dari total 70.982 pengunjung. Dilihat dari angka statistik diatas, dapat dikatakan bahwa warga desa Kebarepan masih sedikit yang mengetahui akan adanya *website* desa ini, hanya sekitar 0,2% setiap harinya dari total pengunjung.

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa penerapan *e-government* di Desa Kebarepan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon belum diterapkan secara optimal, sebagaimana terlihat dari indikasi-indikasi sebagai berikut :

1. Kurangnya sosialisasi pengenalan *website* desa.

2. Beberapa fungsi *website* desa yang masih belum diterapkan, salah satunya fungsi pengaduan *Online*.
3. Pengelolaan *website* desa yang belum efektif, seperti halnya informasi desa berupa produk hukum, transparansi APBDes, artikel desa serta agenda desa yang tidak diperbaharui secara berkala.

Dampak negatif yang ditimbulkan akibat dari indikator-indikator masalah pada *website* desa di Desa Kebarepan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon yaitu :

1. Warga desa masih awam dengan adanya *website* desa.
2. Pengaduan warga masih dilakukan secara manual, baik mendatangi balai desa secara langsung atau menghubungi kepala desa.
3. Penerapan *e-government* di Desa Kebarepan belum dapat diterapkan secara maksimal.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis tentang **“Efektivitas Pengelolaan Website Desa Dalam Upaya Penerapan E-Government di Desa Kebarepan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Kabupaten Cirebon”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu belum efektifnya pengelolaan *website* desa dalam upaya penerapan *e-government* di Desa Kebarepan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.

1.3 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang dikaji berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, yaitu sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengelolaan *website* desa dalam upaya penerapan *e-government* di Desa Kebarepan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon?
- b. Faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat dan mendukung efektivitas pengelolaan *website* desa di Desa dalam upaya penerapan *e-government* di Desa Kebarepan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon?
- c. Upaya-upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam efektivitas pengelolaan *website* desa dalam upaya penerapan *e-government* di Desa Kebarepan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini, yaitu :

- a. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengelolaan website desa dalam upaya penerapan e-government di Desa Kebarepan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat efektivitas pengelolaan website desa di Desa dalam upaya penerapan e-government di Desa Kebarepan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.
- c. Untuk mengetahui upaya-upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam efektivitas pengelolaan website desa dalam upaya penerapan e-government di Desa Kebarepan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dan memperkaya kajian khususnya dalam bidang efektivitas pengelolaan *website* desa dalam upaya penerapan *e-government* sebagai penyempurnaan teori-teori Administrasi Publik.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah desa dalam mengatasi hambatan-hambatan mengenai efektivitas pengelolaan *website* desa dalam upaya penerapan *e-government* di Desa Kebarepan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.

1.6 Kerangka Pemikiran

Efektivitas merupakan tingkat keberhasilan yang ditentukan melalui suatu kinerja, proses atau cara tertentu demi tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan kuantitas, kualitas serta ketepatan waktu pada proses pencapaian tujuan tersebut.

Menurut Prasetyo Budi Saksono (1984:78), efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan *output* yang dicapai dengan *output* yang diharapkan dari sebuah *input*.

Menurut Mardiasmo (2017:134), efektivitas merupakan tolak ukur yang menjadi tingkat keberhasilan atau kejayaan suatu organisasi untuk mencapai tujuan, maka organisasi telah berjalan dengan efektif.

Menurut Beni (2016:69), efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan dan prosedur dari organisasi.

Menurut Makmur (2011:7), mengemukakan beberapa segi kriteria efektivitas, sebagai berikut :

a. Ketepatan Waktu

Yaitu sesuatu yang bisa menentukan berhasilnya suatu kegiatan yang dilaksanakan organisasi tapi juga bisa berakibat terhadap sebuah kegagalan dari aktivitas organisasi. Penggunaan waktu secara tepat akan melahirkan efektivitas pencapaian tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya.

b. Ketepatan Perhitungan Biaya

Berhubungan ketepatan dari sebuah organisasi dalam pemanfaatan biaya, dalam artian tidak mengalami kekurangan juga tidak mengalami kelebihan dalam pembiayaan sampai sebuah kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Ketepatan dalam menetapkan satuan biaya ialah bagian daripada efektivitas.

c. Ketepatan Dalam Pengukuran

Dengan ketepatan ukuran yang telah ditentukan sebelumnya sebenarnya merupakan gambaran daripada efektivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawab dari suatu organisasi.

d. Ketepatan Dalam Menentukan Pilihan

Menetapkan pilihan bukan persoalan yang gampang dalam organisasi dan juga bukan hanya prediksi saja akan tetapi melalui tahap-tahap proses, sehingga dapat ditemukan penetapan yang terbaik diantara yang terbaik atau yang terjujur diantara yang jujur atau keduanya yang terbaik dan terjujur diantara dari yang baik dan jujur.

e. Ketepatan Berpikir

Ketepatan berpikir akan menciptakan keefektifan sehingga sebuah kesuksesanlah yang akan senantiasa diinginkan itu dapat memberikan hasil secara maksimal.

f. Ketepatan Dalam Melakukan Perintah

Keberhasilan dari suatu aktivitas pada organisasi sangat dipengaruhi kemampuan dari seorang pemimpin, salah satunya ialah kemampuan memberikan sebuah perintah yang sangat jelas dan mudah dipahami bawahan. Jika perintah yang dikeluarkan tidak dapat dimengerti dan dipahami oleh bawahan maka akan berujung kegagalan yang tentunya akan merugikan organisasi.

g. Ketepatan Dalam Menentukan Tujuan

Ketepatan dalam menentukan suatu arah dan tujuan merupakan aktivitas organisasi dalam rangka mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Tujuan yang ditetapkan secara tepat dan jelas akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan dari kegiatan organisasi terutama yang berorientasi pada jangka panjang.

h. Ketepatan-ketepatan Sasaran

Penetapan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara perorangan maupun secara kelompok organisasi sangat menentukan keberhasilan dari suatu aktivitas organisasi. Demikian juga sebaliknya, jika sasaran yang ditentukan itu kurang tepat, maka akan menghambat dan memperlama pelaksanaan dari berbagai kegiatan organisasi itu sendiri.

Menurut Campbell J.P (dalam Mutiarin, 2014:96-97) mengemukakan mengenai pengukuran efektivitas program, sebagai berikut :

a. Keberhasilan program

Efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan program dapat ditinjau dari proses dan mekanisme suatu kegiatan dilakukan di lapangan.

b. Keberhasilan sasaran

Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan dengan memusatkan perhatian dengan memusatkan perhatian terhadap aspek *output*, artinya efektivitas dapat diukur dengan seberapa jauh tingkat *output* dalam kebijakan dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

c. Kepuasan terhadap program

Kepuasan merupakan kriteria efektivitas yang mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Kepuasan dirasakan oleh para pengguna terhadap kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Semakin berkualitas produk dan jasa yang diberikan maka kepuasan yang dirasakan oleh pengguna semakin tinggi, maka dapat menimbulkan keuntungan bagi lembaga.

d. Tingkat *input* dan *output*

Pada efektivitas tingkat *input* dan *output* dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*). Jika *output* lebih besar dari *input* maka dapat dikatakan efisien dan sebaliknya jika *input* lebih besar dari *output* maka dapat dikatakan tidak efisien.

Marzuki (2020:20-21), mengemukakan beberapa tujuan dan manfaat adanya *Website* Desa, sebagai berikut:

a. Tujuan *Website* Desa;

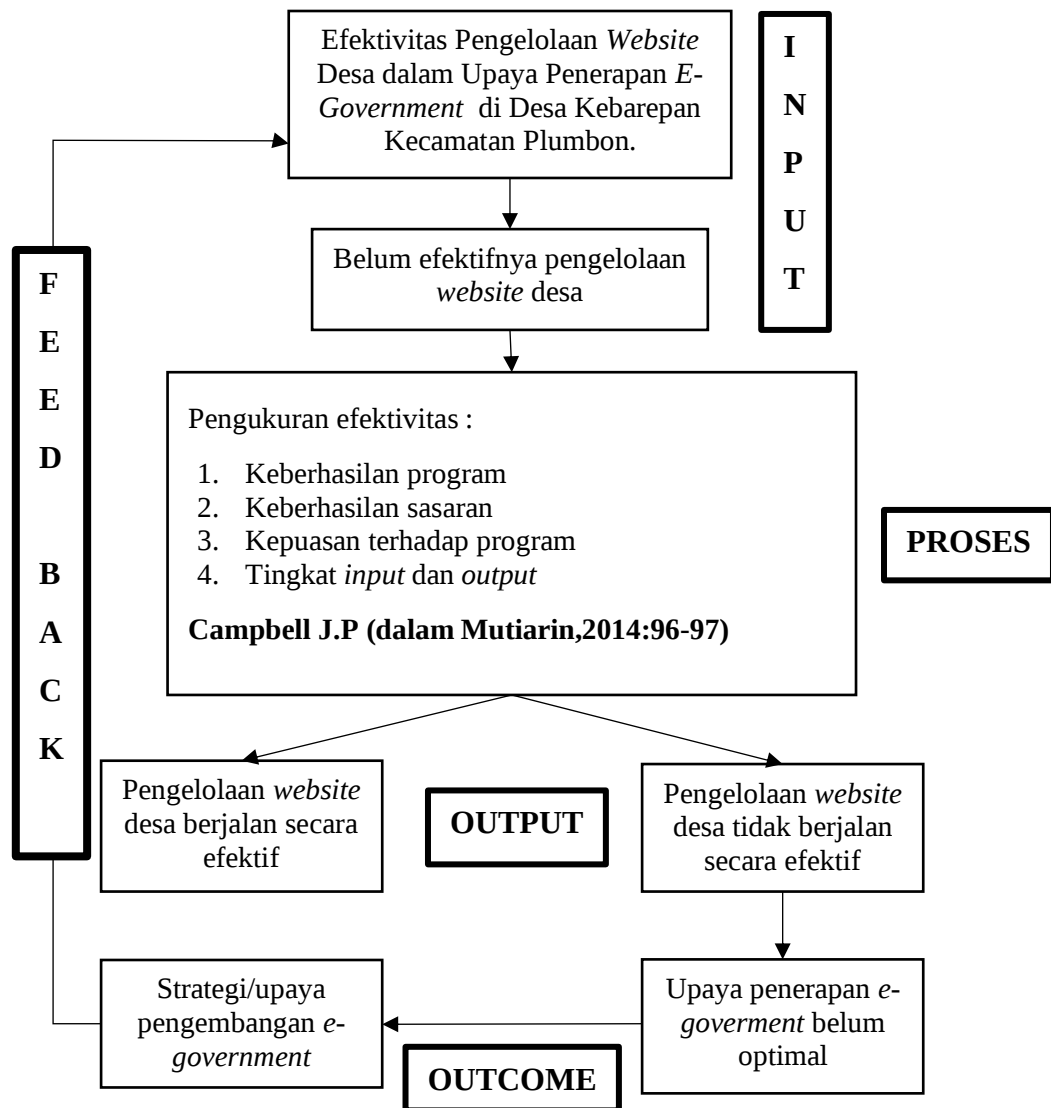
- 1) Publikasi keberadaan desa ke seluruh Indonesia bahkan dunia
- 2) Menginformasikan profil dan seluruh potensi desa
- 3) Mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai desa, sebagai bentuk keterbukaan informasi publik
- 4) Memberikan dan mendapatkan informasi dengan cepat tanpa hambatan, dalam rangkaian percepatan pembangunan desa
- 5) Program-program desa, foto-foto kegiatan desa, video pun dapat diakses di seluruh dunia
- 6) Pasar desa *online*, dapat menyajikan seluruh potensi industri kreatif desa dan bisa berpromosi di *Website* Desa
- 7) Pengumuman desa, yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh warga desa di seluruh Indonesia bahkan yang sedang di luar negeri

- 8) Berita terkini program desa, dapat memberikan informasi ke publik pembangunan desa sehingga bisa bersinergi dengan gerak langkah pembangunan daerah
- 9) Interaksi masyarakat dengan masyarakat dan perangkat desa dapat secara langsung tanpa hambatan tempat dan waktu.

b. Manfaat *Website* Desa

- 1) Merupakan sarana pelaporan yang berbasis *online* mengenai proses dan hasil pembangunan di desa
- 2) Menjadi sarana komunikasi dan juga informasi kepada masyarakat
- 3) Sumber data dan informasi lengkap tentang desa
- 4) Sebagai media penyimpanan data penting tentang desa
- 5) Menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan desa
- 6) Pengawasan penyelenggaraan pemerintah di desa
- 7) Membantu mempercepat pembangunan desa maupun kelurahan
- 8) Dapat memperkenalkan profil desa di masing-masing desa kepada seluruh masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, kerangka penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti **Gambar 1.1** di bawah ini :



Gambar 1.1 Kerangka Efektivitas Pengelolaan Website Desa dalam Upaya Penerapan E-Government di Desa Kebarepan Kecamatan Plumbon.

1.7 Definisi dan Operasionalisasi Konsep Penelitian

1.7.1 Definisi Konsep Penelitian

Definisi Efektivitas menurut Beni (2016:69) adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Artinya, keberhasilan dari suatu program atau suatu kegiatan bergantung terhadap proses pelaksanaan dengan memanfaatkan kuantitas, kualitas, sumber daya manusia di dalamnya serta waktu pelaksanaan yang cepat dan tepat serta perencanaan yang sesuai dan matang demi tercapainya tujuan suatu program atau kegiatan tersebut.

Berdasarkan definisi dan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah penyelesaian keberhasilan suatu program atau kegiatan dengan mempergunakan waktu sebaik-baiknya serta dengan prosedur dan konsep perencanaan yang tepat.

Definisi *e-government* menurut Darmawan Napitupulu, dkk. (2020:5-6) adalah wujud pemanfaatan TIK oleh sektor publik untuk membangun suatu mekanisme interaksi yang baru antara pemerintah dengan seluruh stakeholder (warga, bisnis, lembaga pemerintahan lainnya) dengan tujuan untuk menyediakan akses informasi secara luas, layanan publik yang berkualitas serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Definisi *website* desa menurut Ismail Marzuki, dkk. (2020:20) adalah sebuah situs yang berisikan kumpulan informasi baik dalam bentuk tulisan, gambar, suara, atau video yang dapat diakses melalui jaringan Internet, atau jaringan wilayah lokal (LAN) melalui alamat Internet yang dikenali sebagai URL.

Tabel 1.1.
Operasionalisasi Konsep Penelitian

Konsep	Dimensi	Parameter
Pengukuran Efektivitas (Campbell J.P (dalam Mutiarin, 2014:96-97))	Keberhasilan program	1. Menentukan tujuan yang ingin dicapai 2. Tugas dan fungsi penentu kinerja perangkat desa
	Keberhasilan sasaran	1. Fokus penerima layanan 2. Sosialisasi program
	Kepuasan terhadap program	1. Dasar kebijakan tata kelola 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada warga desa
	Tingkat <i>input</i> dan <i>output</i>	1. Sarana dan prasarana penunjang program 2. Sistem pengelolaan <i>website</i>

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Metode Penelitian yang Digunakan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif atau metode naturalistik. Metode naturalistik merupakan penelitian yang dilakukan pada latar ilmiah yaitu pada suatu situasi sosial yang sedang berlangsung. Pendekatan yang digunakan dalam metode naturalistik adalah pendekatan deskriptif yaitu menggambarkan fenomena yang sedang diteliti kemudian menganalisisnya secara mendalam.

Menurut Sugiyono (2018:213), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekan pada makna.

Menurut Kirk & Miller (dalam Basri, 2021:41) mendefinisikan bahwa :

“Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Hal tersebut mengidentifikasi hal-hal yang relevan dengan makna baik dalam beragamnya keadaan dunia keberagaman manusia, beragam tindakan, beragam kepercayaan dan minat dengan berfokus pada perbedaan bentuk-bentuk hal yang menimbulkan perbedaan makna.”

1.8.2 Informan dan Teknik Pemilihan Informan

Informan penelitian merupakan orang yang diyakini memiliki pengetahuan luas tentang permasalahan yang sedang diteliti. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling.

Menurut Moleong (dalam Rukin, 2014:67) mengemukakan bahwa:

“Penetapan informan dalam sebuah penelitian dapat menggunakan metode purposive dimana peneliti menetapkan informan berdasarkan anggapan bahwa informan dapat memberikan informasi yang diinginkan penelitian sesuai dengan permasalahan penelitian. Dengan kata lain informan yang dipilih adalah informan kunci yang baik pengetahuan serta keterlibatan mereka dengan permasalahan yang akan diteliti tidak diragukan lagi. Selain itu nantinya semua informan tersebut diwawancarai secara mendalam (*indept interview*) untuk mendapatkan informasi yang absah, relevan dan memadai.”

Adapun rincian informan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Informan kunci (*key informan*) yaitu orang-orang yang paling banyak mengetahui mengenai masalah yang diteliti, yaitu Kepala Desa dan Sekretaris Desa Kebarepan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.
- b. Informan pendukung (*supported informan*) yaitu orang-orang di luar informan kunci yang dapat memberikan informasi pelengkap atau tambahan yang diperlukan dalam penelitian, yaitu Warga Desa Kebarepan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Definisi pengumpulan data menurut Mamik (2015:103) adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Sedangkan data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghasilkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, terdiri dari :

1. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan terkait, arsip, internet, laporan dinas dan sumber-sumber lainnya.

Adapun menurut Rukin (2021:71) mengemukakan bahwa studi pustaka ini juga membaca teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Studi Lapangan

Dalam penelitian ini penulis melakukan studi lapangan, yaitu teknik pengumpulan data secara langsung demi memperoleh data yang lebih absah dengan menggunakan dua teknik pengumpulan data studi lapangan, yaitu :

a. Observasi

Peneliti turun langsung ke lapangan mengamati hal-hal yang sebenarnya terjadi di lokasi penelitian dengan aktif sebagai

pengamat. Tidak hanya sebagai pengamat, peneliti juga tidak menutup kemungkinan untuk ikut turun langsung sebagai pelaku yang terlibat langsung dalam suatu aktivitas atau kegiatan di lokasi penelitian.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab mengenai permasalahan yang diteliti baik itu kepada informan kunci maupun informan pendukung untuk memperoleh data yang lebih akurat dari narasumber.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau catatan mengenai permasalahan yang diteliti untuk memperoleh informasi yang relevan, baik berupa surat kabar, arsip, naskah teks maupun foto.

1.8.4 Teknik Pengujian Keabsahan Data

Teknik pengujian keabsahan data dalam penelitian ini memiliki instrumen penelitian berupa peneliti itu sendiri yang dibantu oleh instrumen-instrumen penelitian lain seperti buku catatan lapangan, kamera, alat perekam, dan lain-lain. Teknik pengujian keabsahan data dalam penelitian ini meliputi :

- a. Triangulasi**, teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. (Moleong, 2010:330)

- b. Bahan Pendukung (Referensi),** adanya sarana pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Misalnya, data yang diperoleh didukung dengan bukti foto atau rekaman hingga dokumen autentik agar lebih dipercaya. (Sugiyono, 2014:275)
- c. Mengecek Data (Membercheck),** proses pengecekan yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan proses ini ialah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. (Sugiyono, 2014:276)

1.8.5 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2014:244) mengemukakan bahwa Analisis data adalah

“proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan untuk mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.”

Menurut Miles dan Huberman dikutip Sugiyono (2010:91) menyatakan bahwa kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sehingga datanya mencapai titik jenuh.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data menurut Miles dan Huberman (dalam Muh. Fitrah dan Luthfiyah, 2018:85) ada tiga macam uraian kegiatan dalam analisis data ini, yaitu :

1) Reduksi Data

Dalam pengumpulan data kualitatif. Peneliti menggunakan berbagai teknik dan berlangsung secara berulang-ulang sehingga diperoleh data sangat banyak dan kompleks. Reduksi data merupakan bentuk analisis untuk mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang dan menyusun data ke arah pengambilan kesimpulan.

2) Penyajian Daya (*Display Data*)

Melalui penyajian data maka sebuah data akan terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3) Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, sehingga dapat berubah setiap saat apabila tidak didukung bukti-bukti yang kuat. Tetapi apabila kesimpulan yang telah diambil didukung dengan bukti-bukti yang absah dan konsisten, maka kesimpulan yang diambil bersifat fleksibel.

1.9. Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.9.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil lokasi di Desa Kebarepan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon. Berikut alasan-alasan penelitian di lakukan di Desa Kebarepan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon tersebut yaitu karena :

- a. Ada masalah di lokasi penelitian yang harus dipecahkan atau dicari solusinya.
- b. Data yang dibutuhkan dalam penelitian mudah diperoleh.
- c. Lokasi penelitian terjangkau.

1.9.2. Rencana Jadwal Penelitian

Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini kurang lebih 6 bulan, yang dimulai pada bulan Maret hingga Agustus 2022. Rencana jadwal penelitian dapat dilihat dalam **Tabel 1.2** di bawah ini.

Tabel 1.2.

Rencana Jadwal Penelitian

No.	Rencana Kegiatan	2022																							
		Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
I.	TAHAP PERSIAPAN																								
1.	Studi Literatur																								
2.	Pengamatan																								
3.	Penyusunan dan Bimbingan Proposal																								
4.	Seminar Proposal																								
II.	TAHAP PELAKSANAAN																								
1.	Observasi																								
2.	Wawancara																								
3.	Pengolahan data																								
4.	Penyusunan dan bimbingan draf skripsi																								
III.	TAHAP AKHIR																								
1.	Seminar draf skripsi																								
2.	Ujian sidang skripsi																								